

## **RESPONSIVITAS DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI WANITA RAWAN SOSIAL PSIKOLOGIS (WRSP) DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA YOGYAKARTA**

### ***THE RESPONSIVITY OF SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA SOCIAL GOVERNMENT SERVICE IN HANDLING WOMAN WITH PSYCHOLOGICAL SENSIVITY (WRSP) IN WOMAN PROTECTION AND SOCIAL REHABILITATION HOUSE OF YOGYAKARTA***

Oleh : Kamalil Ersyad dan Lena Satlita, M.Si., FIS, UNY,  
[kamaliler5y4d@gmail.com](mailto:kamaliler5y4d@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Responsivitas Dinas Sosial DIY dalam Menangani WRSP di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (BPRSW) Yogyakarta dan faktor penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa responsivitas Dinas Sosial DIY dalam menangani WRSP di BPRSW Yogyakarta cukup responsif. Hal ini dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu: (1) kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sudah responsif, karena identifikasi kebutuhan WRSP dilakukan secara berkelanjutan. (2) Kemampuan organisasi untuk menyusun prioritas kebutuhan masyarakat sudah sesuai, karena penyusunan prioritas kebutuhan berdasarkan skala prioritas masalah WRSP yang membutuhkan intervensi segera. (3) Kemampuan organisasi untuk mengembangkan kebutuhan masyarakat kedalam berbagai program, dalam hal ini BPRSW sudah memiliki enam program layanan untuk memberikan penanganan yang responsif bagi WRSP. Namun untuk program layanan Konsultasi Psikososial belum berjalan dan perlu diperbaiki. Adapun faktor penghambat dalam penanganan WRSP adalah anggaran yang menurun drastis, kurangnya jumlah pekerja sosial, dan WRSP yang tidak kooperatif.

Kata kunci: Responsivitas, Wanita Rawan Sosial Psikologis, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

#### **ABSTRACT**

*This research aimed to know and describe The Responsivity of Social Government Service of DIY in Handling WRSP in Woman Protection and Social Rehabilitation House (BPRSW) of Yogyakarta, as well as the inhibiting factor. This research was a descriptive with qualitative approach research. The findings of the research showed that the Responsivity of Social Government Service of DIY in Handling WRSP in BPRSW of Yogyakarta was quite responsive. This can be seen through three indicators, namely: (1) organization's ability to identify the requirements of the society was already responsive, because WRSP's requirements identification was done continually. (2) Organization's ability to prioritize the requirements of the society was already proper, because the priority arrangement was done based on the priority scale of the problem of WRSP who needs intervention immediately. (3) Organization's ability in improving the requirements of the society into various programs, in this case BPRSW has had six service innovations to give a responsive treat towards woman with psychological sensitivity. However, the Psychosocial Consultation program has not yet operated and it need to be repaired. Whereas, the inhibiting factors in treating WRSP were the drastically decreased budget, the limited volunteers, and the uncooperative WRSP.*

*Keywords: Responsivity, Woman with Psychological Sensivity, Protection and Social Rehabilitation*

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi polemik utama dalam masyarakat yang harus segera diselesaikan. Jumlah masyarakat DIY yang berstatus sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada tahun 2016 tercatat sebanyak 486.087 orang, jumlah ini terbilang naik mencapai 2 % (8.404 orang) dari tahun 2015. (Dinas Sosial DIY, 2017).

Dari jumlah tersebut, salah satu jenis PMKS dengan jumlah terbanyak dan mengalami peningkatan adalah wanita rawan sosial psikologis (WRSP). WRSP adalah wanita yang karena faktor psikologis atau sosial, baik pribadi maupun lingkungannya memiliki kerawanan melakukan penyimpangan norma dan mengalami gangguan keberfungsian sosial. (dinsos.jogjaprovo.go.id, 2017). Termasuk masalah WRSP adalah wanita rawan sosial ekonomi, dimana pada tahun 2016 terdapat sebanyak 12.840 orang. Disamping itu juga terdapat keluarga bermasalah sosial psikologis di DIY sebanyak 4932 KK. (Dinas Sosial DIY, 2017).

Tingginya jumlah penyandang WRSP di DIY dapat terjadi dikarenakan banyak faktor. Salah satunya adalah karena kondisi latar belakang WRSP yang terhimpit ekonomi, tidak melanjutkan sekolah dan tidak bekerja. Selain itu, fenomena meningkatnya jumlah WRSP

juga diakibatkan masih banyaknya wanita yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, atau seksual maupun penelantaran.

Kondisi WRSP yang sangat memperhatikan tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas jumlah penyandang saja, melainkan juga perlu dipahami dampak panjang yang dapat ditimbulkan. Karena apabila tidak ditangani dengan responsif, penyandang WRSP rawan untuk melakukan penyimpangan sosial seperti melakukan tindak kriminalitas yang dapat merugikan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, perkembangan populasi WRSP yang tidak ditangani segera, akan menambah beban dan menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Penanganan terhadap masalah WRSP menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial DIY sebagai organisasi dinas daerah dibawah Pemerintah Provinsi DIY. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, bahwa dalam Pasal 2 dijelaskan tentang tugas Dinas Sosial yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial, dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas perbantuan yang diberikan pemerintah. Upaya keseriusan Dinas Sosial DIY dalam menangani banyaknya penyandang WRSP adalah

dengan mendirikan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta yang khusus menangani wanita dengan masalah rawan sosial psikologis.

Namun dalam pelaksanaannya, penanganan terhadap WRSP dinilai masih menemui berbagai kendala. Beberapa masalah yang dihadapi adalah selama ini proses penanganan oleh Dinas Sosial DIY masih bersikap menunggu daripada berinisiatif menjangkau langsung para penyandang WRSP yang berada di wilayah DIY. Hambatan yang lainnya adalah terbatasnya SDM pekerja sosial dan kompetensi yang dimiliki untuk dapat menangani penyandang WRSP yang sangat banyak. Terlebih BPRSW Yogyakarta sebagai tempat penampungan WRSP yang disediakan oleh Dinas Sosial DIY hanya memiliki kapasitas hunian maksimal untuk 60 orang.

Berdasarkan data latar belakang dan permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa penanganan oleh Dinas Sosial DIY terhadap WRSP di wilayah DIY masih menemui banyak kendala yang dapat menghambat penanganan terhadap WRSP. Oleh karena demikian, maka peneliti menganggap penting untuk mengkaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Responsivitas Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menangani Wanita Rawan Sosial Psikologis (WRSP)

di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan menganalisis responsivitas penanganan terhadap WRSP yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY dan faktor penghambat yang dihadapi dalam penanganannya.

Dalam menilai dan mengukur Responsivitas Dinas Sosial DIY dalam menangani WRSP di BPRSW Yogyakarta, penelitian ini menggunakan indikator responsivitas yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2014:148). Pada indikator ini terdapat tiga aspek pengukuran responsivitas, yaitu: (1) Kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, (2) Kemampuan organisasi untuk menyusun prioritas kebutuhan masyarakat, dan (3) Kemampuan organisasi untuk mengembangkan kebutuhan masyarakat ke dalam berbagai program.

Teori ini dipakai dalam penelitian ini, karena dinilai relevan untuk menggambarkan responsivitas Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani masalah WRSP di BPRSW Yogyakarta. Serta dengan mempertimbangkan jenis layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial DIY berupa jasa penanganan dan perlindungan, maka indikator tersebut dinilai sesuai untuk menggambarkan kondisi permasalahan yang diharapkan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.

### **Subjek Penelitian**

Kepala BPRSW Yogyakarta, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial BPRSW Yogyakarta, dua Pekerja Sosial BPRSW Yogyakarta, Psikolog di BPRSW Yogyakarta, dan empat WRSP di BPRSW Yogyakarta.

### **Data dan Sumber Data**

Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan observasi terkait dengan responsivitas Dinas Sosial DIY dalam menangani WRSP di BPRSW Yogyakarta. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi yang didapat peneliti di BPRSW Yogyakarta.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti, yang bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif yang didukung oleh instrumen pengumpulan data lainnya berupa pedoman wawancara, pedoman observasi,

buku catatan, dan telepon genggam sebagai alat perekam hasil wawancara.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik wawancara semi terstruktur. Artinya wawancara dalam penelitian ini tetap menggunakan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, tetapi peneliti juga melakukan pertanyaan lain untuk merespon kembali terhadap data atau respon yang diberikan oleh informan.

#### 2. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis observasi non partisipan, yakni peneliti hanya mengamati secara langsung mengenai penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY terhadap WRSP di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta.

#### 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengecek dokumen internal BPRSW, berupa buku profil Dinas Sosial DIY dan buku profil BPRSW, Lampiran Surat Keputusan Kepala BPRSW Yogyakarta No. 188/00002 tentang Penetapan Instruktur, Penanggung Jawab Evaluasi Kelayan, Pendamping Pelayanan Rehabilitasi Sosial, dan Pramu Sosial

BPRSW Tahun 2017, Matrik Seksi PRS BPRSW Tahun 2017, Buku Induk Daftar WRSP BPRSW, Rekapitulasi Buku Inventaris, dan Buku SPM layanan BPRSW dan sumber lain berupa jurnal hasil penelitian.

#### **Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Artinya peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan isi suatu dokumen terkait dengan data hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber agar data tersebut dapat lebih dipercaya.

#### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Proses memahami dan menilai responsivitas Dinas Sosial DIY dalam menangani WRSP di BPRSW Yogyakarta dianalisis dengan menggunakan tiga indikator dari Agus Dwiyanto (2014:148). Ketiga indikator tersebut meliputi kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, kemampuan organisasi untuk menyusun prioritas kebutuhan masyarakat, dan kemampuan organisasi untuk mengem-

bangkan kebutuhan masyarakat kedalam berbagai program.

#### **Kemampuan Organisasi untuk Mengidentifikasi Kebutuhan Masyarakat**

Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal terhadap WRSP yang berada di wilayah DIY, Dinas Sosial DIY melalui BPRSW melakukan berbagai langkah dan metode pendekatan untuk mengidentifikasi masalah dan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan dalam penanganan WRSP. Langkah dan metode pendekatan yang diambil oleh BPRSW dilaksanakan secara berkelanjutan, hal ini untuk menjamin agar masalah yang diidentifikasi merupakan masalah yang benar-benar dialami oleh WRSP. Sehingga dengan demikian penanganan terhadap mereka dapat dilakukan secara tepat.

Identifikasi kebutuhan pertama kali dilakukan melalui cara koordinasi dengan lembaga atau pihak yang merujuk WRSP dengan meminta catatan kasus atau keterangan lebih lanjut mengenai masalah yang dialami WRSP. Tujuannya adalah untuk menggali informasi yang riil dan detail, sehingga nantinya penanganan terhadap WRSP dapat dilakukan dengan benar. Hal ini mengingat bahwa WRSP yang baru masuk, seringkali mereka tidak menyadari permasalahan yang mereka alami, sehingga mereka bersikap acuh ketika dilakukan identifikasi.

Selain itu BPRSW juga tetap melakukan *assessment* terhadap WRSP yang baru masuk. *Assessment* dilakukan oleh Pekerja Sosial untuk mengungkap dan menelaah kebutuhan utama WRSP berdasarkan masalah yang dialaminya, sehingga untuk memperoleh hasil yang optimal kegiatan ini dilakukan secara terus menerus selama satu minggu dengan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap WRSP. Kegiatan *assessment* terhadap WRSP juga dibantu oleh tim psikolog yang ada di BPRSW Yogyakarta.

Disamping itu, selama WRSP mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial dan keterampilan di BPRSW, mereka akan senantiasa dipantau perkembangannya. BPRSW berupaya bersikap responsif untuk mengetahui kebutuhan yang diharapkan WRSP, sehingga untuk itu BPRSW memiliki beberapa metode pendekatan untuk mengidentifikasi kebutuhan WRSP yang mungkin saja mengalami perkembangan selama berada di BPRSW. Pendekatan yang dilakukan ialah dengan cara Pekerja Sosial dan juga Psikolog melakukan pendekatan secara langsung terhadap WRSP yaitu dengan cara membangun kepercayaan dan rasa nyaman dari WRSP, sehingga dengan begitu nantinya mereka akan mudah untuk cerita tentang masalah dan kebutuhannya. Pendekatan ini dinilai sangat efektif, karena dilakukan sesuai kondisi dan

kebutuhan WRSP. Selain dengan pendekatan secara langsung, BPRSW juga memiliki waktu khusus untuk mengidentifikasi kebutuhan WRSP yang dilaksanakan dengan *sharing/diskusi* dan penjangkaran kebutuhan WRSP secara berkelompok. Pendekatan secara kelompok ini dilakukan oleh Pekerja Sosial sebagai pendamping utama selama WRSP berada di BPRSW, serta dilakukan oleh psikolog dan instruktur melalui kegiatan pelajaran (*bimbingan fisik, mental dan sosial*) maupun dalam *bimbingan keterampilan*.

Dari ketiga langkah dan model pendekatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial, Psikolog maupun oleh Instruktur terhadap WRSP yang berada di BPRSW dapat dikatakan bahwa cara yang digunakan tersebut berhasil untuk mengidentifikasi kebutuhan WRSP. Kebutuhan yang diharapkan oleh WRSP ialah meliputi :

1. Kebutuhan Perlindungan

Perlindungan menjadi kebutuhan utama yang diinginkan oleh WRSP. Hal ini dapat terjadi karena permasalahan utama yang dihadapi oleh WRSP adalah mereka yang berada dalam suatu lingkungan yang membuatnya merasa takut, tertekan, dan tersakiti.

Selain itu juga banyak ditemui kebutuhan WRSP juga membutuhkan perlindungan hukum dari kasus hukum yang dilakukan mereka sebelumnya.

## 2. Kebutuhan Pemulihan

Wanita rawan sosial psikologis (WRSP) yang berada di BPRSW banyak mengalami permasalahan sosial, kekerasan fisik maupun non-fisik (mental, psikologis) yang membuat mereka mengalami stres dan depresi. Kondisi yang demikian menjadi kebutuhan utama WRSP lainnya yang perlu mendapat pemulihan segera. Pemulihan mental dibutuhkan bagi mereka yang sudah menjadi korban kekerasan mental dan mengalami trauma dan depresi.

Sementara kebutuhan pemulihan fisik dibutuhkan bagi WRSP yang mengalami kekerasan fisik seperti wanita korban luka-luka dan wanita dengan kehamilan tidak dikehendaki yang membutuhkan pertolongan medis.

## 3. Kebutuhan Kesehatan

Kesehatan menjadi kebutuhan WRSP yang berada di BPRSW, karena kesehatan dibutuhkan agar mereka dapat mengikuti segala program kegiatan rehabilitasi dan keterampilan yang disediakan oleh BPRSW dalam rangka pemulihan kondisi fisik, mental dan sosialnya agar nantinya WRSP bisa melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.

## 4. Kebutuhan Pelatihan Keterampilan

Kebanyakan WRSP yang ditangani di BPRSW adalah mereka

dengan masalah ekonomi lemah atau dari kondisi keluarga miskin/tidak mampu, tidak dapat melanjutkan sekolah dan tidak bekerja. Dari latar belakang kondisi yang demikian banyak WRSP yang masuk ke BPRSW dengan tujuan agar bisa mendapatkan pelatihan keterampilan sebagai bekal untuk dapat berusaha atau bekerja.

Dari uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial DIY melalui BPRSW sudah memiliki kemampuan yang baik untuk mengidentifikasi kebutuhan WRSP. Keberhasilan BPRSW untuk mengetahui kebutuhan WRSP dilakukan secara berkelanjutan, serta proses identifikasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pekerja Sosial, tetapi juga dibantu oleh Tim Psikolog, dan instruktur yang juga melakukan pendampingan dan bimbingan.

### **Kemampuan Organisasi untuk Menyusun Prioritas Kebutuhan Masyarakat**

Penyusunan kebutuhan prioritas WRSP dilakukan oleh BPRSW dengan berdasarkan pada skala prioritas masalah WRSP yang membutuhkan intervensi dan penanganan segera. Dari berbagai kebutuhan yang diharapkan tersebut, BPRSW berupaya untuk memberikan pemenuhan atas berbagai kebutuhan yang diprioritaskan. Agenda yang dilakukan oleh BPRSW dalam merespon prioritas

kebutuhan WRSP dilaksanakan dengan berbagai kebijakan sebagai berikut :

1. Jaminan Keamanan dan Perlindungan Hukum

Jaminan perlindungan dan rasa aman oleh BPRSW dilakukan dengan memberikan fasilitas tempat dan lingkungan yang aman serta dengan merahasiakan keberadaan WRSP sebagai upaya untuk menjaga dan membantu WRSP keluar dari masalah sosial maupun psikologisnya. Selain itu, BPRSW juga memberikan perlindungan hukum berupa pendampingan oleh advokat bagi WRSP yang tersangkut kasus hukum.

2. Pemulihan Mental melalui Pendampingan, Rehabilitasi, Konseling, dan Motivasi.

BPRSW memiliki agenda kebijakan pemulihan mental WRSP dengan cara pendampingan, rehabilitasi, konseling dan motivasi kepada klien. Mendapatkan kepercayaan WRSP. Kegiatan mendampingi yang dilakukan sebagai media konsultasi, dan pemberian motivasi terhadap klien menjadi tugas utama Pekerja Sosial. Selain itu pendampingan juga dilakukan dengan tim Psikolog BPRSW yang terdiri dari lima orang psikolog yang melakukan bimbingan pengajaran, *assessment* lebih lanjut dan juga melakukan terapi penyembuhan

(*hilling*) dan tes psikolog untuk mengetahui penyebab masalah yang dialami WRSP beserta kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan

Proses pemulihan mental klien juga dilakukan dengan cara bimbingan rehabilitasi oleh instruktur yang memberikan pendampingan dan pengajaran materi sesuai bidang keahliannya yang mencakup bimbingan fisik, mental, dan sosial dimana bimbingan-bimbingan tersebut diejawantahkan kedalam berbagai mata pelajaran yang diajarkan.

3. Pemulihan fisik melalui Fasilitas Bantuan Medis dan Layanan Persalinan Gratis

Bagi WRSP korban kekerasan dan mengalami luka fisik, BPRSW memulihkan fisiknya dengan memberikan fasilitas bantuan medis. BPRSW melakukan kerjasama dengan beberapa Puskesmas terdekat seperti Puskesmas Godean II sehingga apabila nanti terdapat klien yang mengalami kekerasan fisik maka tenaga medis dari puskesmas tersebut akan datang ke BPRSW untuk memeriksa keadaan WRSP. Sementara itu, bagi WRSP yang mengalami kekerasan seksual berupa kehamilan tidak dikehendaki (KTD), BPRSW memberikan perlindungan dan pemulihan fisik dengan cara menjamin

kesehatan WRSP sampai yang bersangkutan melahirkan.

Jika WRSP tersebut membutuhkan perawatan lebih lanjut, atau pihak Puskesmas tidak dapat menangani dan memberikan rujukan perawatan ke rumah sakit, maka BPRSW akan mengakomodasi dan menanggung seluruh biaya kebutuhan perawatannya.

#### 4. Pemeriksaan Rutin setiap Bulan dan Fasilitas Kesehatan Gratis

Prioritas kebutuhan kesehatan WRSP dilakukan dengan agenda pemeriksaan rutin setiap bulan dari tenaga medis Puskesmas Godean II yang rutin melakukan kontrol dan pemeriksaan kondisi kesehatan WRSP. Namun apabila terdapat WRSP yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, maka pihak BPRSW akan responsif untuk memeriksakan klien yang bersangkutan ke Puskesmas terdekat.

#### 5. Penyediaan Empat Macam Latihan Keterampilan, PKL, dan Sertifikasi

BPRSW menyediakan empat jenis latihan keterampilan dengan didampingi instruktur per bidang keterampilan, meliputi keterampilan batik (tulisan dan cap), keterampilan salon/tata rias, keterampilan jahit, dan keterampilan olahan pangan. WRSP yang berada di BPRSW dapat mengikuti satu bidang keterampilan sesuai dengan minat dan skill yang dimilikinya. Latihan

keterampilan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan terhadap WRSP yang dilaksanakan rutin setiap hari senin sampai dengan Sabtu.

Bagi WRSP yang dinyatakan terampil dan memenuhi syarat kelulusan dapat mengikuti kegiatan praktik bimbingan kerja (PBK) selama 25 hari di perusahaan atau tempat usaha, kemudian apabila lulus akan mendapatkan sertifikat kelulusan dari BPRSW.

Dinas Sosial DIY melalui BPRSW Yogyakarta dapat dikatakan sudah mampu melakukan penyusunan prioritas kebutuhan WRSP. Hal ini dapat dilihat dari berbagai agenda kebijakan dan layanan yang ditetapkan BPRSW disesuaikan dengan prioritas masalah dan kebutuhan WRSP.

#### **Kemampuan Organisasi untuk Mengembangkan Kebutuhan Masyarakat kedalam Berbagai Program**

Dalam upaya untuk meningkatkan layanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi wanita dengan permasalahan sosial psikologis, BPRSW Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis Dinas Sosial DIY melakukan enam inovasi layanan kepada masyarakat (*public service*) yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan WRSP yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Enam program layanan tersebut ialah sebagai berikut.

1. Program Bimbingan Mental Sosial dan Keterampilan (Reguler)

Program reguler diperuntukkan bagi wanita yang mengalami permasalahan sosial sehingga mereka memiliki tingkat kerawanan untuk melakukan berbagai penyimpangan sosial. Dalam kata lain, WRSP yang ditangani melalui program reguler adalah mereka yang belum sampai menjadi korban. Akan tetapi WRSP yang berstatus sudah menjadi korban pun juga bisa mengikuti program reguler apabila yang bersangkutan sudah sembuh dan siap mengikuti kegiatan program reguler. Selama pelayanan, WRSP diwajibkan mengikuti kegiatan bimbingan rehabilitasi yang meliputi bimbingan fisik, mental dan sosial serta bimbingan keterampilan selama kurang lebih dua belas. Nantinya WRSP di program ini dapat mengikuti kegiatan praktik bimbingan kerja (PBK).

2. Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC)

Layanan RPTC diperuntukkan untuk melindungi dan memulihkan kondisi wanita yang mengalami masalah trauma sosial atau depresi psikologis akibat ketertekanan maupun akibat kekerasan yang dialaminya. Dari banyak kasus yang ditangani melalui program RPTC di BPRSW adalah

wanita yang mengalami kekerasan dalam keluarga, korban *trafficking*, wanita dengan kehamilan tidak dikehendaki, dan wanita korban ketergantungan obat akibat *socio friend*, sehingga kemudian mereka mendapat tekanan dari lingkungan sosialnya, hingga mereka mengalami trauma dan depresi.

Klien yang mengalami masalah sebagaimana diatas, akan mendapat pelayanan intensif di RPTC selama kurun waktu minimal satu minggu sampai dengan enam bulan dari Pekerja Sosial dan dibantu oleh Psikolog.

3. Rumah Bunda

Layanan rumah bunda merupakan inovasi produk layanan BPRSW terbaru yang dibentuk karena adanya kebuntuan pelayanan lanjutan WRSP dari RPTC, dimana untuk penanganan WRSP yang mengalami KTD, sebelumnya hanya dilayani sampai wanita yang bersangkutan melahirkan. Setelah melahirkan, anak yang dilahirkan tersebut dipisah dan dipindahasuhkan ke Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). kebijakan tersebut dinilai menyalahi aturan, karena telah memisahkan hubungan anak dengan ibunya serta tidak memberi pelajaran buat sang ibu.

Sehingga untuk menjamin pelayanan dan perlindungan terhadap ibu dan anak, BPRSW mengembangkan

program rumah bunda dengan jangka waktu pelayanan maksimal satu tahun. Selama pelayanan, WRSP dengan bayinya tetap dianjurkan mengikuti kegiatan bimbingan rehabilitasi (fisik, mental, dan sosial) dan mengikuti latihan keterampilan, namun tanpa melalaikan tugas utamanya untuk mengasuh anaknya.

#### 4. Konsultasi Psikososial

Program ini merupakan layanan konsultasi gratis yang dibuka untuk masyarakat umum khususnya bagi wanita yang mengalami permasalahan sosial untuk bisa melakukan konsultasi dengan psikolog atau dengan pekerja sosial yang ada di BPRSW. Namun, Meskipun pengembangan program konsultasi psikososial sudah tersedia sejak lama, namun dalam implementasinya program ini belum dapat dilaksanakan dengan baik. Selama ini belum pernah ada masyarakat umum yang datang ke BPRSW untuk mengakses layanan tersebut, hal ini dapat terjadi salah satunya karena kurangnya sosialisasi program oleh lembaga kepada masyarakat.

#### 5. Pelayanan Kemitraan

Pelayanan kemitraan dikembangkan oleh BPRSW sebagai upaya untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya bagi WRSP yang berada di

wilayah DIY. Kemitraan yang dilakukan tidak berupa uang/barang melainkan berupa hubungan kerjasama dalam perbantuan jasa dan tenaga dalam membantu penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi WRSP.

BPRSW menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai lembaga seperti dengan sesama UPTD Dinas Sosial DIY untuk kerjasama saling merujuk klien sesuai permasalahan masyarakat dan kemampuan UPTD. Selain itu kemitraan dengan beberapa Puskesmas dan Rumah Sakit yang dapat membantu pelayanan kesehatan klien, Kepolisian, LSM Rifka Anisa dan lembaga pelayanan publik lainnya.

#### 6. Sertifikasi Eks Binaan

Program layanan sertifikasi merupakan pelatihan keterampilan lanjutan diperuntukkan bagi alumni warga binaan BPRSW yang sudah lulus dari BPRSW dan telah menekuni pekerjaan atau bekerja sesuai dengan bidang keterampilan yang diikuti selama mengikuti kegiatan rehabilitasi dan keterampilan di BPRSW. Kegiatan sertifikasi bagi alumni warga binaan diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi nasional selama kurang lebih 25 hari di BPRSW.

Dari paparan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial DIY

melalui pelaksana teknisnya BPRSW sudah memiliki enam program layanan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan masalah yang dialami WRSP yang berada di wilayah DIY. Program yang dikembangkan BPRSW tersebut hampir semuanya sudah dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial DIY sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan program kebutuhan penanganan WRSP. Meskipun untuk program konsultasi psikososial belum dapat berjalan sebagaimana diharapkan, sehingga perlu dibenahi lagi kedepannya.

#### **Faktor Penghambat Penanganan WRSP oleh Dinas Sosial DIY**

Adapun faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial DIY dalam menangani WRSP di BPRSW Yogyakarta adalah sebagai berikut.

##### **1. Pengurangan Anggaran yang Drastis**

Ketersediaan jumlah anggaran yang dimiliki BPRSW pada tahun 2018 mengalami pemangkasan yang cukup banyak. Pada tahun 2018 anggaran yang dimiliki BPRSW adalah sebesar Rp.900.455.269,- jumlah ini menurun sebanyak lebih 18 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi demikian menyebabkan berbagai program pelayanan yang sudah direncanakan atau ada sebelumnya terpaksa harus mengalami perubahan. Beberapa

dampak perubahan tersebut, adalah penghapusan program sosialisasi dan penjangkauan, serta pengurangan jam pelajaran untuk keterampilan.

##### **2. Kurangnya Jumlah Pegawai**

Jumlah Pekerja Sosial di BPRSW hanya berjumlah lima orang dengan masing-masing memiliki anak asuh sebanyak 11 - 12 anak. Jumlah tersebut tidak efektif karena idealnya satu peksos hanya memiliki 6 - 8 anak asuh.

##### **3. WRSP yang Tidak Kooperatif**

Penyebab WRSP bersikap tidak kooperatif salah satunya adalah karena kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa mereka mengalami masalah sosial. Selain itu penjangkauan terhadap WRSP belum bisa dijangkau sepenuhnya karena mereka tidak tahu, tidak memiliki ketertarikan dan/atau malu untuk mengikuti program rehabilitasi di BPRSW.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Setelah melakukan serangkaian analisis dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta melalui BPRSW Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknisnya sudah cukup responsif dalam menangani WRSP. Dinas Sosial DIY sudah memiliki kemampuan yang baik untuk mengidentifikasi kebutuhan WRSP

karena proses identifikasi dilakukan dengan langkah dan metode pendekatan secara berkelanjutan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kebutuhan WRSP mencakup kebutuhan perlindungan, kebutuhan pemulihan (mental dan fisik), kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pelatihan keterampilan.

Dinas Sosial DIY juga dinilai sudah mampu menyusun prioritas kebutuhan WRSP. Hal ini dapat dilihat dari cara penentuan kebutuhan prioritas yang didasarkan pada skala prioritas masalah WRSP yang membutuhkan penanganan segera. Untuk itu BPRSW memiliki agenda kebijakan yang diupayakan sebagai langkah responsif untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang diprioritaskan tersebut dengan memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum, pemulihan mental melalui konseling, rehabilitasi, motivasi dan pendampingan, sementara pemulihan fisik diberikan fasilitas bantuan medis dan layanan persalinan gratis, pemeriksaan rutin setiap sebulan sekali dan fasilitas kesehatan gratis, menyediakan empat macam latihan keterampilan, fasilitas PBK dan sertifikasi.

Responsivitas Dinas Sosial DIY juga dilihat dari kemampuan lembaga yang sudah memiliki enam inovasi program layanan penanganan yang dikembangkan berdasarkan masalah dan kebutuhan WRSP yang berada di wilayah DIY.

Program tersebut meliputi program reguler, RPTC, Rumah Bunda, Konsultasi Psikososial, Kemitraan, dan Sertifikasi Eks Binaan. Namun untuk program konsultasi psikososial belum dapat diimplementasikan sebagaimana diharapkan sehingga perlu diperbaiki kembali. Sementara faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial DIY dalam memberikan penanganan adalah pengurangan anggaran yang drastis sehingga mengakibatkan penghapusan program sosialisasi dan penjangkauan dan pengurangan jam pelajaran untuk pelatihan keterampilan, kurangnya jumlah pegawai, serta WRSP yang tidak kooperatif.

#### **Saran**

1. Hendaknya pengurangan anggaran disikapi dengan bijak yaitu dengan mengurangi beberapa program yang kurang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan terhadap WRSP.
2. Memperluas kerja sama dengan organisasi lokal masyarakat dan menambah media penyebarluasan informasi seperti melalui media sosial untuk dapat membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penjangkauan terhadap masyarakat.
3. Dalam rangka menyikapi tenaga pekerja sosial yang sedikit, BPRSW dapat melakukan kegiatan pelatihan dan pendidikan untuk mengoptimalkan kemampuan pegawai dalam menangani WRSP di BPRSW Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adi, I. R., (2013). *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto, A. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- \_\_\_\_\_. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kartono, K. (1980). *Pengantar Metodologi Research Social*. Bandung: Alumni.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- Sinambela, L.P., et.al. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Santosa, P. (2012). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Utama.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik" Bagian Kedua Edisi Revisi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Soekanto. (2006). *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soetomo. (2010). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suryabrata, S. (2008). *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tangkilisan & Hessel, N.S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wiriaatmadja, R. (2012). *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

### Jurnal dan Artikel Ilmiah Lainnya :

- Ramadhani, M., Sarbaini & Matnuh, H. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 6, No. 11, Mei 2016*.
- Rondonuwu, A.W., Jericho, R.& Pombengi, D. (2015). Implementasi Good Governance di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik. Vol 2, No 029*.
- UNDP. (2014). Discussion Paper : Governance for Sustainable Development Integrating Governance in the Post-2015

Development Framework. Artikel. *undp.org*.

Depsos RI. 2009. *Dukungan Kelembagaan dalam Kerangka Peningkatan Kesejahteraan Lansia (Kantor Urusan Pemberdayaan Lansia)*. Jakarta: Departemen sosial RI.

#### Skripsi :

Anggraeni, P. D. (2016). *Responsivitas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsos Nakertrans) dalam Perlindungan Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Rahayu Kabupaten Ngawi*. Skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Dinardo, D. (2017). *Peran Pekerja Sosial dalam Program Rehabilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta*. Skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Nugroho, W. A. (2016). *Metode Bimbingan Keagamaan Bagi Wanita Rawan Sosial Psikologis di Lembaga Panti Sosial Karya Wanita Yogyakarta*. Skripsi, tidak diterbitkan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

#### Peraturan Perundang-undangan :

Gubernur DIY. (2015). *Pergub DIY, Nomor 100 tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial*.

Permensos. (2012). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*

(PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

\_\_\_\_\_. (2014). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial*. (2012). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial*.

#### Internet dan Website Pemerintah :

BPS DIY. (2017). Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2017. *yogyakarta.bps.go.id*. Diakses pada 21 November 2017 Pukul 14.20 WIB, melalui: <https://yogyakarta.bps.go.id/Brs/view/id/500/>

Dinas Sosial DIY. (2017). Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. [dinsos.jogjaprov.go.id](https://dinsos.jogjaprov.go.id). Diakses pada 16 November 2017 Pukul 09.10, melalui: <http://dinsos.jogjaprov.go.id/download/data-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial/>

Slamet. (2013). Kajian Evaluatif Keberhasilan Rehabilitasi Sosial BPRSW. [dinsos.jogjaprov.go.id](https://dinsos.jogjaprov.go.id). Diakses pada 15 November 2017 Pukul 13.40, melalui: <http://dinsos.jogjaprov.go.id/kajian-evaluatif-keberhasilan-rehabilitasi-sosial-BPRSW/>.

Tribunnews.com. (2017). Rifka Anisa Catat Rata-Rata Ada 300 Laporan Kekerasan Perempuan di DIY. *jogja.tribunnews.com*. Diakses pada Kamis, 16 November 2017 pukul 07.05 WIB. Melalui: [jogja.tribunnews.com/amp/2017/03/08/rifka-anisa-catat-rata-rata-ada-300-laporan-kekerasan-perempuan-di-diy](http://jogja.tribunnews.com/amp/2017/03/08/rifka-anisa-catat-rata-rata-ada-300-laporan-kekerasan-perempuan-di-diy)